

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia memiliki beberapa kota besar yang mempunyai populasi yang besar sekaligus menjadi pusat perkembangan, salah satunya adalah Kota Bandung. Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Daerah Jawa Barat.

Kota Bandung dari dulu hingga sekarang banyak mengukir prestasi dan inovasi guna membangun peradaban wilayah Kota Bandung menjadi lebih baik. Salah satunya adalah Kota Bandung mendapat nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tertinggi di Jawa Barat dan peringkat ke-11 Nasional untuk LPPD 2017 serta penghargaan dibidang kerjasama untuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (bandung.bisnis.com).

Dibalik semua prestasi yang diraih, dari sisi akuntabilitasnya terhadap LKPD, Kota Bandung masih belum bisa menyeimbangkannya dengan menyajikan laporan keuangan yang belum maksimal. Berdasarkan data rekap opini hasil pemeriksaan LKPD entitas di Jawa Barat dalam bandung.bpk.go.id, tercatat bahwa Kota Bandung baru mendapat opini WTP lebih lambat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat. Tidak seimbang dengan pencapaian kinerja yang baik selama bertahun-tahun (dibuktikan dengan prestasi yang disebutkan di atas) namun baru mendapatkan opini paling tinggi untuk pertama kalinya. Meskipun pemerintah daerah yang memperoleh predikat opini audit yang baik belum dapat dipastikan pemerintah daerah tersebut telah berkinerja dengan baik pula, namun apabila kinerja penyelenggara pemerintah daerahnya (LPPD) sudah baik maka opini yang didapat pasti baik. Hal ini menjadi pertimbangan penulis memilih Kota Bandung sebagai objek penelitian.

Tabel 1.1

Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Jawa Barat

No	Entitas Pemda	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Provinsi Jawa Barat	WTP						
2	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	Kota Banjar	WTP						
4	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kota Cimahi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kota Depok	WTP						
9	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Data yang telah diolah dalam bandung.bpk.go.id

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang memuat pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, dijabarkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Angelicca (2019) dan Ferryono, Sutaryo (2017) bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SAP yang sudah ditetapkan sebagai patokan untuk menilai apakah LKPD disusun telah sesuai dengan SAP serta berperan untuk membantu para penyusun laporan keuangan dalam mencapai kualitas pelaporan keuangan yang

diinginkan serta mempermudah pengambilan keputusan internal. SAP yang berlaku saat ini adalah SAP berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No 71 Tahun 2010). Dalam konteks ini, Kota Bandung kerap gagal untuk mendapatkan opini WTP karena masalah pengelolaan aset dan kewajiban yang dijabarkan pada wawancara yang dilakukan detik news kepada Sekretaris Daerah Ema Sumarna pada 28 Mei 2019 (detik.news.com). Dimana masalah-masalah tersebut berkaitan dengan penyusunan informasi yang tertera di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bagian aset dan kewajiban yang mengacu pada PSAP no 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dan PSAP no. 9 tentang Akuntansi Kewajiban. Meskipun salah satunya sudah berhasil diselesaikan sehingga tahun 2019 ini bisa meraih WTP namun Pemerintah Daerah Kota Bandung harus menuntaskan masalah-masalah tersebut agar opini bisa dapat dipertahankan sehingga penilaian dari pemeriksaan BPK bisa terus meningkat. Selain itu, terjadi inkonsisten hasil penelitian terkait penerapan SAP berbasis akrual. Menurut penelitian Andhayani (2017), penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah dinilai kurang efektif, karena kurangnya sinergi, kemauan, serta komitmen dari seluruh pengelola keuangan. Namun, menurut Purwanti (2017) dan Trihani (2018) meskipun penerapan SAP berbasis akrual menguras tenaga dan dianggap sebagai keterpaksaan, namun disisi lain bisa dianggap berkah karena bisa mendapatkan opini WTP dari penyajian laporan keuangan yang baik.

Tujuan pelaporan keuangan disektor publik harus memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan di samping menunjukkan akuntabilitasnya. Pengambilan keputusan keuangan internal pemerintah meliputi anggaran (perencanaan dan pelaksanaan), pelaksanaan program pemerintah, dan output berupa posisi kekayaan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun laporan

keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, akan tetapi laporan keuangan dijadikan sebagai patokan informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan (Trihani, 2018). Seperti fenomena yang sedang terjadi, masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung adalah permasalahan defisit yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada tahun 2013 sebesar 387 M (news.detik.com), lalu tahun 2017 sebesar 216 M (merdeka.com), dan tahun 2019 ini dengan jumlah yang cukup besar yaitu 609 M (bandung.kompas.com) Permasalahan defisit ini tidak diusut secara tuntas karena berbagai masalah yang terjadi, seperti bagian penyusunan anggaran yang kurang efisien dan pembiayaan daerah yang kurang tepat. Hal ini menyimpang pada indikator penyusunan perencanaan anggaran dan Keluaran (output) berupa posisi kekayaan daerah yang digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkala serta berdampak pada terhambatnya indikator pelaksanaan program pemerintahan. Maka dari itu, laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku harus mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian Salam dan Sutaryo (2019), menyatakan bahwa pelaporan keuangan berdasar SAP berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan internal, sedangkan dalam penelitian Ferryono, Sutaryo (2017) menyatakan bahwa basis akuntansi akrual berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan internal pemerintah daerah.

Untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat, maka laporan keuangan yang dibuat harus memenuhi karakteristik kualitatif yang mencerminkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah tercapai dengan baik dan memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No 24 Tahun 2005). Adapun indikator dari kualitas laporan keuangan itu sendiri, yaitu: (1) Relevan (2) Andal (3) Dapat dibandingkan (4) Dapat dipahami. Dalam fenomena yang terjadi, pada tahun 2019 ini Kota

Bandung meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya atas hasil kerja kerasnya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tanggal 27 Mei 2019. Meskipun sudah meraih predikat WTP, namun Pemerintah Kota Bandung harus menghadapi tantangan yaitu bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam hal penataan penyusunan laporan keuangan daerah yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan tetap berkualitas. Dimana dalam penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan basis yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian Anggriawan, Yudianto (2018) disebutkan bahwa penerapan SAP basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian Rahmah, Zulkifli (2018) menyebutkan bahwa penerapan SAP basis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penerapan SAP berbasis kas-menuju-akrual diberlakukan terakhir sampai dengan tahun anggaran 2014 dan berbasis akrual mulai diterapkan secara penuh pada tahun anggaran 2015. Dengan demikian, pada tahun 2019 ini, yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun dalam penerapan SAP berbasis akrual, pemerintah daerah sudah harus sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual yang dilaksanakan dengan baik. Basis akrual adalah sebuah perubahan di dalam proses pencatatan dan pelaporan yang akan membawa pada konsekuensi dibidang pertanggung-jawaban keuangan yang cukup drastis dan hal ini perlu dikaji kembali dalam penerapan SAP berbasis akrual itu sendiri.

Namun pada praktiknya, bahwa pemerintah daerah, khususnya di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat masih belum bisa menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memadai sehingga belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kesiapan dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Pemeriksaan LKPD tahun 2018. Disamping itu, permasalahan mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum sepenuhnya memadai dan pengambilan keputusan keuangan yang tidak maksimal menjadi poin penting yang peneliti ambil dalam menyusun penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah:

- 1) Bagaimana penerapan SAP berbasis akrual, pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
- 2) Bagaimana pengaruh penerapan SAP berbasis akrual secara parsial terhadap pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
 - a. Bagaimana pengaruh penerapan SAP berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal pada Pemerintah Kota Bandung?
 - b. Bagaimana pengaruh penerapan SAP berbasis akrual pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung?

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis penerapan SAP berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung
- 2) Untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP berbasis akrual secara parsial terhadap pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung
 - a. Untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal pada Pemerintah Kota Bandung
 - b. Untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP berbasis akrual pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, baik secara aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan SAP berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan daerah.
2. Menambah wawasan bagi para pembaca tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah digunakan serta perannya terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas dan manfaat dari laporan keuangan daerah Kota Bandung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengaruh SAP berbasis akrual dalam

pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua

menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.